



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM**

UNIT KERJA : **ANGGOTA/DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PERIZINAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUDIRMAN SAAD**
2. Jabatan : **ANGGOTA/DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PERIZINAN**
3. NHK : **79913**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.893.000.000**

1. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 470 m2/203 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.040.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/80 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 768.000.000
4. Tanah Seluas 2.313 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
5. Tanah Seluas 233 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
6. Tanah Seluas 749 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.280.000.000
8. Bangunan Seluas 39 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 75.000.000**

1. MOBIL, HONDA FRED Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	39.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.707.615.715
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	718.119.241
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.432.734.956
III. HUTANG	Rp.	177.839.257
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.254.895.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.